Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Definisi Operasional Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	Definisi Operasional Indikator Sasaran Daerah	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Isu Strategis PD	Tujuan Renstra PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Definisi Operasional Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi Renstra PD	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program	Formula Indikator Program	DO Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran (output)	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Kewilayahan	"Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera" atau Magelang Anyar Gress	Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Reformasi Birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan 2 (dua) jenis reformasi birokrasi, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100, RB Tematik 20, total IRB memiliki bobot 120.	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sumber: Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Merupakan hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik	Meningkatkan pelaksanaan teknis kewilayahan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sumber: Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di tingkat- kecamatan	Merupakan hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik di tingkat kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	jumlah pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti / jumlah pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang seharusnya dilaksanakan x 100%	Indikator yang mencerminkan pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi : 1. Pemerintahan 2. Pelayanan Publik 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau kelurahan 4. Tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	(Jumlah pelayanan publik sesuai SOP/Jumlah pelayanan publik yang terlaksana)*100%	Merupakan hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah jenis pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa dll di Kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan sesuai SOP	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP dalam 1 tahun	Kecamatan
																																		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan dalam 1 tahun	
																																		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan dalam 1 tahun	
																									2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi / Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan di Kecamatan .... X 100%	lembaga dan kelompok masyarakat : 1.kelompok budaya 2.kelompok keagamaan 3. kelompok peduli lingkungan 4. bumdes 5. karang taruna 6. LPMD 7. PKK 8. Posyandu 9. RT RW 10. koperasi 11. UMKM 12. dan/sejenisnya dengan bentuk kegiatan: 1. musrenbangdes 2. gulkin 3. bankeu 4. data desa 5. budaya 6. keagamaan 7. stunting 8. ATS 9. hari besar nasional/daerah 10. proklim/bank sampah 11. inovasi 12. bumdes 13. karang taruna 14. LPMD	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa dan/atau kelurahan	Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kecamatan
																							Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Merupakan hasil pengukuran (berupa angka) dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah jenis pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa dll di Kecamatan										Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa x Jumlah Desa	
																																		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam 1 tahun	
																																Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam 1 tahun;	
																																		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dalam 1 tahun	
																																		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam 1 tahun	
																									3. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan		3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	(Jumlah koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan /Jumlah masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terjadi di wilayah)*100%	koordinasi dalam bidang : - HUT RI - linmas - narkoba - bencana - forkompimcam - pemantauan kegiatan wilayah	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan di Kecamatan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan kebencanaan	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Frekuensi koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan dalam 1 tahun	
																																		Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan dalam 1 tahun	

																								4. Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	jumlah desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi / jumlah desa di Kecamatan .... x 100%	lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi : 1. perdes/perkades 2. admindes 3. aset desa 4. PBB 5. APBDesa 6. APBDesa perubahan 7. apel kinerja 8. bimtek 9. pilkades 10. BPD 11. pemberhentian perangkat 12. pengangkatan perangkat 13. musrenbang kec 14. IDM 15. data desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan daam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen Perdes dan Perkades yang difasilitasi dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen keuangan desa dan aset desa yang difasilitasi dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang berisi pertanggungjawaban tugas Kades dan Perangkat Desa dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan pemilihan kepala Desa dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen yang berisi tugas dan fungsi BPD dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam 1 tahun	
																																	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa dalam 1 tahun	

Ditandatangani secara elektronik oleh ;

CAMAT TEGALREJO

Pembina Tk. I
NIP. 19680109 199303 1 005

Balai Sertifikasi Elektronik

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah